

# POLICY BRIEF

KERUSAKAN JALAN DI LAMPUNG

2023



## EDITED BY

Ariskha Damaiyanti

Esti Eprianti

Dini Ananda

Chintya Febrianti

Aisyah Aprilia

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
ADMINISTRASI PUBLIK

# Executive Summary

Policy brief kerusakan jalan di Lampung adalah sebuah proposal kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat tindakan perbaikan jalan yang ada di provinsi Lampung. Rekomendasi kebijakan ini didasarkan pada perbaikan infrastruktur jalan rusak di Lampung. Pada tahun ini pemerintah pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Lampung. Biaya tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai tahap pembangunannya pada bulan Juni setelah proses lelang dilakukan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengeksekusi pengambilalihan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Provinsi Lampung. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan perbaikan jalan daerah itu mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN. Mengacu kepada data 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, direkomendasikan identifikasi dan prioritas jalan yang membutuhkan perbaikan, perbaikan jalan utama, dan ajalan akses, perbaikan jalan berdasarkan kategori kerusakan, anggaran, dan sumber daya, pemeliharaan preventif, kolaborasi dengan pihak terkait. Arah pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tidak terlepas dari adanya Peran dari masing-masing actor pemerintahan dengan kewenangannya masing-masing. Kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dibangun melalui berbagai cara, salah satunya dengan pemanfaatan media social, hal ini sejalan dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan karena setiap kebijakan membutuhkan feedback sebagai bahan evaluasi nantinya.

## Pendahuluan

Potensi sumber daya alam yang sangat tinggi di Provinsi Lampung, belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Dibutuhkan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan rantai pasok, sehingga daya saing dan kapasitas perekonomian daerah semakin tinggi. Potensi di Lampung sangat luar biasa, tapi IPM dan indikator ekonominya masih rendah. Kita masih menitik beratkan pada bahan mentah. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dalam diskusi tersebut, mengatakan infrastruktur jalan berperan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, terutama pemerataan pembangunan di berbagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik pada level regional dan nasional. Mendapati dampak kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang disebabkan oleh kendaraan bermuatan batu bara berlebih, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan perketat pengawasan kendaraan batu bara yang melintas dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).



Kondisi infrastruktur jalan yang baik memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konektivitas sosial, dan mobilitas masyarakat. Namun, di Lampung, terdapat tantangan yang perlu segera ditangani terkait dengan kerusakan jalan yang menghambat kemajuan dan perkembangan daerah. Keberadaan jalan yang rusak menghadirkan risiko bagi keselamatan pengguna jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Policy brief ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Lampung terkait kerusakan jalan serta menyampaikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Melalui langkah-langkah strategis yang terarah, diharapkan Lampung dapat memperbaiki infrastruktur jalan dengan efisien, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Pertama, kita akan melihat beberapa masalah utama yang timbul akibat kerusakan jalan di Lampung. Kemudian, akan dijelaskan mengapa penanganan kerusakan jalan ini menjadi prioritas yang mendesak bagi pemerintah dan masyarakat Lampung. Terakhir, akan diuraikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini dan membangun infrastruktur jalan yang lebih baik di Lampung.

Dengan demikian, policy brief ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerusakan jalan di Lampung dan mengajak pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk mengambil tindakan strategis dalam menghadapi tantangan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di Lampung, sambil menjaga keselamatan dan keamanan pengguna jalan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



# Telaah Kritis terhadap Kebijakan

## 01 | Signifikansi Masalah Kerusakan jalan di Lampung

Mendapati dampak kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang disebabkan Oleh kendaraan bermuatan batu bara berlebih, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan perketat pengawasan kendaraan batu bara yang melintas dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Plt. Kepala Dishub Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo menyebutkan, pengetatan pengawasan angkutan batu bara akan dilakukan di tiap lini perbatasan sehingga diharapkan Lampung tak terus mendapatkan dampak kerusakan jalan. Peningkatan pengawasan di Pelabuhan Bakauheni oleh ASDP. Kalau ada yang lewat di Pelabuhan Panjang akan ditangani oleh KSOP Panjang, kami yang di darat mungkin nanti dengan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) untuk penindakan di jalan. Selain itu juga, menurut Bambang, fungsi pengawasan yang efektif terhadap angkutan batu bara adalah di jembatan timbang di Way Kanan. Dari itu dia berharap BPTD bisa segera mengoperasikan jembatan timbang tersebut dan meremajakan yang lain juga. Karena sejauh ini hanya jembatan timbang di Way Urang yang baru beroperasi.

Jika permasalahan muatan batu bara ilegal, pihaknya tak bisa memberikan sanksi karena hal itu menyangkut pidana. Namun jika masalah kelebihan muatan barulah pihaknya bisa melaksanakan penindakan seperti tilang atau mengembalikan muatan ke lokasi semula. Kalau menurunkan muatan pastinya susah. Tapi sekarang sudah dibawa dengan mobil-mobil kecil yang artinya kalau pelanggaran muatan mungkin ada tapi tidak signifikan merusak jalan. Yang dapat merusak itu yang pakai fuso. beliau berharap ketegasan dari Provinsi Sumsel untuk menutup pertambangan ilegal sehingga mobilisasinya tak memberi dampak pada Lampung. Akar keluarnya ada di Sumsel. Kalau memang itu jelas ilegal ya tutup aja sehingga tidak ada lagi yang menambang-nambang jadi tidak ada masalah ke Lampung. Karena Lampung ini menerima imbasnya dari angkutan batu bara yang dikatakan ilegal. Kita tidak tahu legal atau tidak karena kita hanya provinsi yang dilintasi, yang tahu hanya Sumsel.



# Telaah Kritis terhadap Kebijakan

## 02 | Analisis SWOT

Pada identifikasi metode melalui analisis SWOT ditemukannya sebuah kelemahan dan ancaman mengenai kerusakan jalan di lampung yang perlu menjadi perhatian :

### 1. Kekuatan (Strengths):

- a. Kebijakan penegakan hukum yang ketat dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pengemudi kendaraan bermuatan batu bara terhadap batasan muatan.
- b. Adanya perusahaan pertambangan yang dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini, baik melalui peningkatan efisiensi transportasi batu bara maupun pemeliharaan jalan yang terkait.

### 2. Kelemahan (Weaknesses):

- a. Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai untuk menangani muatan berat kendaraan bermuatan batu bara dapat menyebabkan kerusakan yang lebih cepat.
- b. Kurangnya kesadaran dan edukasi kepada pengemudi kendaraan bermuatan batu bara mengenai pentingnya mematuhi batasan muatan dan dampaknya terhadap kerusakan jalan.

### 3. Peluang (Opportunities):

- a. Pelibatan pihak swasta, terutama perusahaan pertambangan, dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat meningkatkan keberlanjutan infrastruktur jalan di Lampung.
- b. Adanya kemajuan teknologi dan inovasi dalam desain jalan yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat muatan berlebih.

### 4. Ancaman (Threats):

- a. Kendaraan bermuatan batu bara yang melanggar batasan muatan dapat terus menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu mobilitas masyarakat.
- b. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan batasan muatan dan mencegah kerusakan jalan lebih lanjut.

kerusakan jalan di lampung yang di sebabkan kendaraan batubara dengan bermuatan berlebih yang berbentuk sebuah kelemahan dan ancaman dapat diperbaiki dengan Mengoptimalkan penegakan hukum yang ketat dengan sanksi yang tegas bagi kendaraan yang melanggar batasan muatan sehingga permasalahan kerusakakan jalan di lampung dapat meminimalisir permasalahan tersebut.



# Rekomendasi kebijakan

## ✓ **PENEGAKAN HUKUM YANG KETAT:**

Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan bermuatan batu bara yang melanggar batasan muatan yang ditetapkan.

## ✓ **PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN**

Melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermuatan batu bara berlebih.

## ✓ **PEMBATASAN MUATAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS**

Menerapkan pembatasan muatan yang lebih ketat sesuai dengan kapasitas maksimum jalan yang ditetapkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

## ✓ **SOSIALISASI DAN EDUKASI**

Melakukan kampanye sosialisasi yang luas kepada pemilik dan pengemudi kendaraan bermuatan batu bara tentang dampak kerusakan jalan akibat muatan berlebih dan pentingnya mematuhi batasan muatan yang ditetapkan.

## ✓ **PENGAWASAN DAN KETERLIBATAN PIHAK SWASTA**

Melibatkan perusahaan pertambangan sebagai mitra dalam mengatasi masalah ini, termasuk menyusun perjanjian kerjasama untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan muatan dan tanggung jawab perusahaan terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan.

## ✓ **MONITORING DAN EVALUASI**

Membentuk tim monitoring yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan batasan muatan serta efektivitas tindakan yang diambil.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, instansi terkait, perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Penerapan kebijakan yang konsisten dan ketat, pengawasan yang efektif, serta edukasi yang intensif akan membantu mengurangi kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermuatan batu bara berlebih di Lampung. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta infrastruktur jalan yang lebih baik, keselamatan pengguna jalan yang terjaga, dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

---

# Rencana Tindak Kebijakan

01 intensifikasi pengawasan polisi



02 alokasi anggaran untuk perbaikan jalan



03 pemberlakuan batasan muatan



04 pelaksanaan kampanye sosialisasi



05 kerjasama dengan perusahaan pertambangan